

PENGUATAN KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN BOLANGITANG TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Ahmad Hengky Sumaili
NPP. 32.0813

Asdaf Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 32.0813@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Gradiana Tefa, S.STP., M.AP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The background of this research is based on the weak role and effectiveness of the Community Protection Unit (Satlinmas) in task execution at the village level, characterized by limited personnel, insufficient training, and minimal support in terms of facilities and incentives. **Objective:** This study aims to analyze the capacity strengthening of the Community Protection Unit (Satlinmas) in maintaining peace and public order in Bolangitang Timur District, North Bolaang Mongondow Regency. **Method:** The research method employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation. This study is analyzed using Grindle's (1997) capacity building theory, focusing on three main **dimensions**: human resource development, organizational strengthening, and institutional reform. The research informants were purposively selected, consisting of 11 individuals who play strategic roles in the implementation, the implementation and supervision of Satlinmas. The informants consisted of: the Head of the Civil Service Police Unit, the Head of the Public Order and Security Division, the Head of the Community Order Section of Bolangitang Timur District, three Heads of Satlinmas from different villages, three Satlinmas members, and two community representatives. Of all the informants, the key informant is the Head of the Civil Service Police Unit of North Bolaang Mongondow Regency. The data were analyzed inductively through the process of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** The research findings show that in the dimension of human resource development, it was found that the coaching and capacity building of Satlinmas members have not been optimally implemented. Training activities are still incidental and tend to only be carried out leading up to certain events, such as elections or major religious celebrations. This hinders the development of technical and non-technical skills. non-technical sustainably. Furthermore, in the dimension of organizational strengthening, it was found that Satlinmas is still facing structural and cultural challenges. One of the main issues is the absence of a permanent incentive system in the village budget. Temporary and activity-based incentives have resulted in low participation and a lack of consistency in the work of members. Finally, in the dimension of institutional reform, the absence of local regulations specifically governing Satlinmas has emerged as a major obstacle. The lack of legal basis has resulted in the failure to establish an efficient, structured work system that meets local institutional needs. **Conclusion:** The conclusion of this research indicates that the capacity strengthening of Satlinmas is still not optimized because it still requires a holistic approach through structural improvements, competency enhancement, regulatory support, and innovations in training systems as well as community involvement. This study also recommends the need for integrated policies in the

institutional reform of Satlinmas at the village level so that it can function more effectively and professionally. Keywords: Capacity Strengthening, Satlinmas, Peace, Public Orde

Keywords: *Capacity building, Satlinmas, public order*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan lemahnya peran dan efektivitas Satlinmas dalam pelaksanaan tugas di tingkat desa, yang ditandai dengan terbatasnya jumlah personel, kurangnya pelatihan, serta minimnya dukungan sarana dan insentif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. **Metode:** Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori capacity building dari Grindle, (1997) dengan fokus pada tiga dimensi utama: pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Informan penelitian dipilih secara purposive, terdiri dari 11 orang yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan dan pengawasan Satlinmas. Informan tersebut terdiri dari: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Trantibum Kecamatan Bolangitang Timur, tiga orang Kepala Satlinmas dari desa yang berbeda, tiga orang anggota Satlinmas, serta dua orang perwakilan masyarakat. Dari keseluruhan informan, yang bertindak sebagai informan kunci (key informant) adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Data dianalisis secara induktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi pengembangan sumber daya manusia, ditemukan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas belum berjalan secara optimal. Kegiatan pelatihan masih bersifat insidental dan cenderung hanya dilaksanakan menjelang peristiwa-peristiwa tertentu, seperti pemilu atau perayaan keagamaan besar. Hal ini menghambat pembentukan kemampuan teknis dan non-teknis secara berkelanjutan. Selanjutnya Pada dimensi penguatan organisasi, ditemukan Satlinmas masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Salah satu isu utama adalah belum adanya sistem insentif yang permanen dalam anggaran desa. Insentif yang bersifat sementara dan berbasis kegiatan berdampak pada rendahnya partisipasi dan kurangnya konsistensi kerja anggota. dan terakhir pada dimensi reformasi kelembagaan, ditemukan ketiadaan regulasi daerah yang secara khusus mengatur tentang Satlinmas menjadi kendala utama. Absennya dasar hukum ini menyebabkan belum terbentuknya sistem kerja yang efisien, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan di tingkat lokal. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas Satlinmas masih belum berjalan dengan maksimal karena masih memerlukan pendekatan holistik melalui pembenahan struktural, peningkatan kompetensi, dukungan regulasi, dan inovasi dalam sistem pelatihan serta pelibatan masyarakat. Studi ini juga memberikan rekomendasi perlunya kebijakan terpadu dalam reformasi kelembagaan Satlinmas di tingkat desa agar dapat berfungsi lebih efektif dan profesional.

Kata Kunci: Penguatan Kapsitas, Satlinmas, Ketentraman, Ketertiban Umum

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks sistem sosial, pemerintah memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Rasyid, 2007:107), termasuk menjamin ketertiban dan keamanan sebagai bagian dari pelayanan publik. Pemerintah juga dituntut untuk menjalankan fungsi pengaturan yang responsif terhadap dinamika sosial terutama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di tingkat lokal (Yoon & Kim, 2018).

Perlindungan masyarakat merupakan amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas) diatur sebagai urusan pemerintahan konkuren dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan dijalankan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan struktural dan fungsional, khususnya di daerah. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, khususnya Kecamatan Bolangitang Timur, data menunjukkan tren peningkatan gangguan trantibum dan kriminalitas dalam tiga tahun terakhir. Kasus seperti minuman keras di tempat umum, penyalahgunaan fasilitas publik, dan pencurian meningkat dari 37 kasus pada 2022 menjadi 71 kasus pada 2024 (Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2024). Bahkan Polres Bolmut mencatat 2.012 kasus kriminal sepanjang 2023, dengan pencurian dan penganiayaan sebagai dominasi. Salah satu kasus menonjol adalah pencurian ternak menggunakan metode peracunan, yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengamanan di tingkat desa (Polres Bolaang Mongondow Utara, 2023).

Peran Satlinmas sebagai garda terdepan dalam perlindungan masyarakat menjadi sangat strategis, namun pelaksanaannya belum optimal. Dengan hanya 53 personel Satlinmas untuk seluruh wilayah desa, distribusi personel yang minim serta kurangnya anggaran operasional dan insentif menjadi hambatan utama. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan tugas, seperti pembentukan regu pengamanan dan kewaspadaan dini di tingkat desa, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 26 Tahun 2020. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu. Pendekatan *community policing* (Polmas) sebagai perwujudan dari *democratic policing*, menekankan pentingnya keterbukaan dan kemitraan antara masyarakat dan aparat, yang dalam konteks ini, Satlinmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi besar untuk diperkuat melalui pendekatan partisipatif, tetapi belum optimal akibat keterbatasan sumber daya (Indarti, 2019). Keberhasilan Satlinmas sangat ditentukan oleh kompetensi personel, regulasi yang jelas, dan sinergi antarlembaga. Faktor-faktor ini juga menjadi isu utama di lapangan dalam penelitian ini (Winarko & Mursyidah, 2024). Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kriminalitas sangat penting, dan pemberdayaan komunitas serta pelatihan bagi Satlinmas dapat meningkatkan efektivitas keamanan lingkungan (Muladi & Suparno, 2021).

Konsep mediasi dan dialog sosial dalam mencegah konflik horizontal juga sangat relevan diterapkan oleh Satlinmas dalam menangani potensi konflik di tingkat lokal (Hariyanto & Suseno, 2025). Pendekatan berbasis komunitas seperti dalam upaya pemberantasan narkoba menunjukkan efektivitas model Polmas dalam membangun ketahanan sosial, dan pendekatan ini dapat diterapkan dalam pencegahan penyakit masyarakat di wilayah penelitian ini (Pasaribu, 2018; Nur & Margaret, 2024). Pentingnya kedekatan emosional dan komunikasi berkelanjutan antara aparat dan warga juga menjadi poin penting, yang sebenarnya merupakan potensi Satlinmas sebagai warga lokal namun belum dimaksimalkan karena keterbatasan jumlah personel dan pelatihan (Aditama et al., 2023; Margaret & Irqi, 2024). Beberapa studi bahkan menyarankan pemanfaatan teknologi digital dan *smart public safety* untuk

meningkatkan responsivitas aparat, yang dapat dijadikan arah pengembangan Satlinmas ke depan melalui sistem pelaporan dan pemantauan digital (Elphick et al., 2021; Xu et al., 2019).

Secara kelembagaan, keterbatasan personel dan anggaran merupakan hambatan umum dalam efektivitas lembaga keamanan local dan juga dialami oleh Satlinmas di Bolmut yang menghadapi persoalan serupa (Fakunle et al., 2020). Selain itu, persepsi negatif terhadap aparat ketertiban publik dapat menjadi penghalang dalam membangun kepercayaan masyarakat, sehingga pendekatan humanis dan edukatif sangat diperlukan (Suhendi, 2021). Koordinasi antarlembaga juga menjadi faktor keberhasilan dalam pengelolaan ketertiban, sebagaimana ditunjukkan oleh studi tentang pengawasan pembangunan di Ghana (Boamah et al., 2012). Hal ini relevan dalam konteks sinergi antara Satlinmas, Satpol PP, Polri, dan pemerintah desa di wilayah ini,

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serta menganalisis hambatan-hambatan struktural dan operasional yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyusun strategi penguatan kelembagaan Satlinmas sebagai unsur penting dalam sistem keamanan berbasis masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Secara ideal, peran Satlinmas sebagai bagian dari sistem keamanan local diatur melalui berbagai regulasi seperti Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, serta dapat diperkuat melalui pendekatan *community policing* (Polmas). Dalam pendekatan ini, sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat merupakan fondasi untuk menciptakan keamanan kolektif yang demokratis dan berkelanjutan (Indarti, 2019). Oleh karena itu, yang seharusnya terjadi adalah Satlinmas mampu menjalankan peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan aparat dalam menjaga ketertiban umum secara partisipatif, dengan dukungan personel yang cukup, kompetensi memadai, serta anggaran yang mendukung operasional rutin.

Namun yang terjadi di lapangan, khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sangat jauh dari harapan tersebut. Berdasarkan temuan lapangan dan wawancara awal, jumlah personel Satlinmas sangat terbatas (hanya 2–4 orang per desa), minimnya dukungan anggaran operasional dan honorarium, serta belum terbentuknya regu pengamanan yang ideal sesuai amanat regulasi. Akibatnya, peran Satlinmas dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani gangguan ketertiban seperti pencurian, premanisme, dan pelanggaran ketentraman umum tidak berjalan maksimal terutama di tengah peningkatan signifikan jumlah kasus kriminal seperti yang terekam dalam data Polres dan media lokal.

Kesenjangan antara ideal dan realitas ini sejalan dengan temuan bahwa pemberdayaan Satlinmas sangat tergantung pada kompetensi, regulasi, dan sinergi kelembagaan, namun di Bolmut, ketiganya masih lemah (Winarko & Mursyidah, 2024). Kendala seperti keterbatasan personel dan rendahnya kapasitas kelembagaan juga merupakan penghambat utama dalam efektivitas penegakan hukum (Fakunle et al., 2020). Hal ini juga terjadi di lokasi penelitian ini.

Lebih lanjut, pentingnya pelatihan, pembagian peran yang jelas, dan kedekatan emosional antara aparat dan masyarakat dalam memperkuat efektivitas Polmas telah digaribawahi dalam berbagai studi (Muladi & Suparno, 2021; Aditama et al., 2023). Namun, karena Satlinmas di Bolmut belum difasilitasi secara memadai, potensi ini tidak berkembang optimal (Aditama et al., 2023). Padahal pendekatan *community-based security* yang dikembangkan di banyak negara justru menunjukkan efektivitas tinggi bila digabungkan dengan teknologi dan pelibatan warga secara aktif (Xu et al., 2019; Elphick et al., 2021). Sayangnya, hal ini belum terimplementasi di daerah penelitian ini (Elphick et al., 2021).

Akhirnya, persepsi negatif masyarakat dan lemahnya koordinasi antarlembaga turut menjadi tantangan yang relevan (Suhendi, 2021; Boamah et al., 2012). Ini tercermin pula di Bolmut, di mana Satlinmas belum cukup mendapatkan legitimasi sosial, dan kolaborasi antara Satlinmas, Satpol PP, Polsek, dan pemerintah desa belum berjalan harmonis dan sistematis (Boamah et al., 2012).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pendekatan *community policing* (Polmas), penegakan ketertiban umum, serta penguatan kelembagaan keamanan masyarakat seperti Satlinmas telah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun secara global. Temuan-temuan dalam berbagai studi ini memberikan kontribusi penting bagi pembentukan strategi kebijakan yang mendukung keamanan berbasis masyarakat di tingkat lokal. Pendekatan *community policing* sebagai perwujudan dari *democratic policing* di Indonesia menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan kemitraan antara masyarakat dan aparat (Indarti, 2019). Dalam konteks ini, peran Satlinmas sebagai unsur perlindungan masyarakat memiliki potensi besar untuk diperkuat secara partisipatif. Hal ini sejalan dengan kebutuhan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di mana partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan belum optimal akibat keterbatasan jumlah personel Satlinmas (Indarti, 2019).

Keberhasilan Satlinmas sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, dukungan regulasi, serta sinergi antar lembaga keamanan (Winarko & Mursyidah, 2024). Penemuan ini mendukung hasil temuan awal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang menunjukkan bahwa kurangnya jumlah personel dan lemahnya dukungan anggaran menjadi hambatan utama dalam optimalisasi peran Satlinmas. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan kriminalitas melalui pendekatan Polmas mampu memperkuat keamanan lingkungan jika dibarengi dengan pelatihan dan pembagian peran yang jelas (Muladi & Suparno, 2021). Dalam konteks penelitian ini, sinergi Satlinmas dengan masyarakat serta Bhabinkamtibmas/Babinsa perlu dioptimalkan untuk menjawab tantangan peningkatan kasus kriminal seperti pencurian dan premanisme di Kecamatan Bolangitang Timur.

Konsep dialog dan strategi mediasi dalam menangani konflik horizontal antarwarga memberi relevansi pada peran Satlinmas sebagai aktor sosial yang berdekatan langsung dengan masyarakat dan dapat berperan sebagai penjembutan konflik di tingkat lokal (Hariyanto & Suseno, 2025). Pemberdayaan komunitas dalam penanggulangan narkoba melalui pendekatan Polmas dapat meningkatkan ketahanan sosial terhadap gangguan keamanan (Pasaribu, 2018; Nur & Margaret, 2024). Pendekatan ini juga relevan untuk diterapkan dalam penanganan gangguan *trantibum* dan penyakit masyarakat yang meningkat di wilayah penelitian ini.

Pentingnya kedekatan emosional dan komunikasi berkelanjutan antara aparat dan masyarakat dalam mencegah konflik serta mempercepat respons terhadap gangguan keamanan telah disoroti dalam studi-studi sebelumnya (Aditama et al., 2023; Margaret & Irqi, 2024). Dalam konteks Bolaang Mongondow Utara, kedekatan antara anggota Satlinmas yang berasal dari masyarakat setempat dengan warga lain seharusnya menjadi kekuatan tersendiri, namun potensi ini belum dimaksimalkan akibat keterbatasan personel dan pelatihan. Penggunaan aplikasi digital, sistem berbasis *blockchain*, serta arsitektur mikroservis merupakan inovasi keamanan publik yang dapat mendukung *smart public safety* dan meningkatkan responsivitas Satlinmas (Elphick et al., 2021; Xu et al., 2019). Temuan ini sangat relevan jika ingin mendorong transformasi digital Satlinmas, terutama dalam pelaporan dan pemantauan dini terhadap potensi gangguan keamanan.

Pendekatan *citizen science* dalam pemantauan bencana memiliki kemiripan dengan Polmas dalam hal partisipasi warga, yang dapat dimanfaatkan dalam model kerja Satlinmas sebagai pemantau keamanan lokal berbasis komunitas (Wolff et al., 2021). Rendahnya kapasitas kelembagaan, jumlah personel yang terbatas, dan minimnya anggaran merupakan

kendala utama dalam efektivitas penegakan hukum dan ketertiban (Fakunle et al., 2020). Hal ini senada dengan kondisi Satlinmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menghadapi kendala serupa, termasuk ketidakteraturan dalam pembayaran insentif (Fakunle et al., 2020). Persepsi negatif masyarakat terhadap aparat ketertiban publik, seperti Satpol PP, dapat menjadi hambatan tersendiri, sehingga pendekatan yang lebih humanis dan edukatif sangat diperlukan (Suhendi, 2021). Bagi Satlinmas, pendekatan ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja (Suhendi, 2021). Koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola ketertiban umum yang baik (Boamah et al., 2012). Dalam konteks penelitian ini, sinergi antara Satlinmas, Satpol PP, Kepolisian, dan Pemerintah Desa sangat penting dalam menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi fokus kajian, pendekatan teori, metode penelitian, serta konteks wilayah dan karakteristik objek yang diteliti, jika dibandingkan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi acuan. Pertama, penelitian Indarti (2019) menitikberatkan pada pendekatan *community policing* (Polmas) sebagai bagian dari implementasi *democratic policing* di Indonesia. Fokus utamanya adalah pada kemitraan antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan berbasis partisipasi. Berbeda dengan itu, penelitian ini secara khusus mengkaji peran dan penguatan kapasitas Satlinmas sebagai lembaga non-polisi yang berada di bawah struktur pemerintahan daerah, bukan institusi kepolisian. Kedua, penelitian Winarko & Mursyidah (2024) membahas peran regulasi dan sinergi antar lembaga keamanan secara umum dalam mendukung efektivitas Satlinmas. Namun, mereka tidak menggunakan kerangka teoritis yang eksplisit. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan teori *capacity building* dari Grindle (1997) yang terdiri dari tiga dimensi utama—pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan—sehingga memberikan struktur analisis yang lebih sistematis dan mendalam terhadap kondisi internal Satlinmas. Ketiga, penelitian Muladi & Suparno (2021) mengkaji peran masyarakat dalam mencegah kriminalitas melalui pendekatan Polmas, sementara penelitian ini lebih menyoroti bagaimana Satlinmas—sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa—berperan dalam menguatkan ketertiban dan ketentraman umum melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas individu anggotanya. Fokusnya lebih pada internalisasi peran Satlinmas, bukan hanya hubungan dengan masyarakat secara umum. Keempat, penelitian Suhendi (2021) membahas persepsi negatif masyarakat terhadap aparat ketertiban seperti Satpol PP, serta perlunya pendekatan humanis dalam penegakan hukum di wilayah perkotaan. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada konteks wilayah pedesaan, yaitu Kecamatan Bolangitang Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang memiliki tantangan dan karakteristik sosial yang berbeda dari konteks urban. Penelitian ini juga menggarisbawahi keterbatasan personel Satlinmas, pelatihan yang minim, serta belum optimalnya pemanfaatan kedekatan emosional antara Satlinmas dan masyarakat setempat. Kelima, penelitian Fakunle et al. (2020) menyatakan bahwa rendahnya kapasitas kelembagaan, minimnya anggaran, serta kurangnya personel merupakan kendala umum dalam efektivitas lembaga penegak ketertiban. Temuan ini sejalan dengan kondisi empiris yang dijumpai dalam penelitian ini, namun penelitian ini menambahkan dimensi kontekstual dari perspektif lokal, dengan metode kualitatif yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan kelembagaan yang belum banyak diangkat dalam penelitian terdahulu. Keenam, penelitian Boamah et al. (2012) menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam tata kelola ketertiban umum, namun belum mengulas secara khusus struktur lokal seperti sinergi antara Satlinmas, Satpol PP, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan pemerintah desa. Penelitian ini secara spesifik menyoroti bentuk koordinasi dan hambatan antar unsur tersebut di tingkat

kecamatan dan desa, menjadikannya lebih aplikatif bagi penguatan struktur keamanan lokal. Ketujuh, penelitian Aditama et al. (2023) dan Margaret & Irqi (2024) menekankan pentingnya kedekatan emosional dan komunikasi antara aparat dan masyarakat dalam mencegah konflik. Penelitian ini mengembangkan gagasan tersebut lebih lanjut dalam konteks Satlinmas, yang secara sosial berasal dari komunitas yang sama dengan warga. Namun potensi kedekatan ini belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama akibat kurangnya pelatihan dan sistem insentif yang tidak memadai. Dengan demikian, dibandingkan dengan berbagai penelitian terdahulu, penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang belum dieksplorasi secara mendalam: mulai dari penggunaan kerangka teoritis yang berbeda, pendekatan metodologis yang lebih eksploratif, lokasi yang belum diteliti sebelumnya, hingga perhatian terhadap dinamika spesifik dari satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam konteks pedesaan yang sangat jarang dijadikan objek kajian.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Penguatan Kapasitas Satuan perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara

II METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai Penguatan Kapasitas Satuan perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurdin dan Hartati (2019), pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat interpretif yang menekankan pada proses eksplorasi dan penafsiran terhadap fenomena secara holistik dan kontekstual dalam lingkungan alaminya, tanpa manipulasi variabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam kondisi faktual, tantangan, serta dinamika sosial-organisasi yang dihadapi Satlinmas dalam menjalankan perannya. Kerangka analisis menggunakan teori *capacity building* dari Grindle (1997), yang terdiri dari tiga dimensi utama: pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Masing-masing dimensi dianalisis berdasarkan indikator seperti pelatihan, kondisi kerja, sistem insentif, perlengkapan, hingga pembaruan kebijakan, guna menggambarkan secara holistik proses dan hambatan dalam peningkatan kapasitas Satlinmas.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi (Simangunsong, 2017). Penelitian ini melibatkan 11 orang informan yang dipilih secara purposive berdasarkan posisi strategis dan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan tugas serta pengawasan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Informan tersebut terdiri dari: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Trantibum Kecamatan Bolangitang Timur, tiga orang Kepala Satlinmas dari desa yang berbeda, tiga orang anggota Satlinmas, serta dua orang perwakilan masyarakat. Dari keseluruhan informan, yang bertindak sebagai informan kunci (key informant) adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penetapan sebagai informan kunci didasarkan pada posisi strategisnya sebagai pimpinan tertinggi dalam lembaga yang menaungi langsung fungsi dan pembinaan Satlinmas, sehingga memiliki pengetahuan dan wawasan menyeluruh terkait kebijakan, pengorganisasian, serta kendala operasional Satlinmas di lapangan.

. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu pada awal Januari 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Polisi Resor Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Lokasi dan waktu penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan aksesibilitas dan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif secara induktif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penguatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Bolangitang Timur

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia merupakan dimensi utama dalam proses penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), terutama dalam konteks menjaga ketertiban dan ketenteraman umum di wilayah Kecamatan Bolangitang Timur. Satlinmas sebagai unsur masyarakat yang berperan langsung dalam membantu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif sangat bergantung pada kapasitas dan kualitas individu yang tergabung di dalamnya. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM merupakan langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Mengacu pada teori **capacity building** dari Grindle, (1997) pengembangan SDM mencakup beberapa aspek penting, yaitu pelatihan, praktik langsung, kondisi kerja, dan proses rekrutmen. Keempat indikator ini saling berhubungan dalam membentuk kerangka kerja yang berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Di tengah tantangan sosial dan geografis yang dihadapi oleh masyarakat Bolangitang Timur, penguatan kapasitas individu anggota Satlinmas menjadi sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan di tingkat desa.

a. Pelatihan (Training)

Pelatihan merupakan elemen pertama dan paling mendasar dalam pengembangan sumber daya manusia. Melalui pelatihan yang baik, anggota Satlinmas dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas di lapangan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan belum menjadi agenda rutin dalam proses pembinaan Satlinmas. Umumnya, pelatihan hanya dilakukan pada momen-momen tertentu seperti menjelang pelaksanaan pemilu, pilkada, atau perayaan keagamaan besar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan belum berbasis kebutuhan jangka panjang. Minimnya pelatihan menyebabkan lemahnya kemampuan teknis anggota Satlinmas, terutama dalam hal penanganan awal konflik, pengelolaan kerumunan massa, dan pengenalan prosedur dasar keamanan lingkungan. Dalam konteks ideal, pelatihan tidak hanya terbatas pada aspek teknis saja, melainkan juga menyentuh aspek soft skills seperti komunikasi publik, negosiasi, dan manajemen risiko. Pelatihan secara rutin dan berkelanjutan sangat diperlukan agar anggota Satlinmas dapat menyesuaikan diri dengan tantangan baru di tengah perubahan sosial yang cepat.

b. Praktik Langsung

Selain pelatihan formal, praktik langsung merupakan bagian integral dalam pembentukan kapasitas individu. Kegiatan di lapangan memungkinkan anggota Satlinmas mengasah keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan. Dalam

konteks Kecamatan Bolangitang Timur, praktik langsung sering kali terbatas pada kegiatan tertentu seperti pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, kegiatan adat seperti Tulude, atau momen seremonial yang berskala besar. Namun, di luar peristiwa-peristiwa tersebut, keterlibatan anggota Satlinmas dalam tugas-tugas rutin masih belum optimal. Keterbatasan ini berakibat pada kurangnya pengalaman lapangan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan cepat, penanganan insiden kecil secara mandiri, hingga membangun relasi sosial yang kuat dengan masyarakat. Oleh karena itu, idealnya praktik langsung dilakukan melalui patroli lingkungan, pendampingan kegiatan masyarakat, serta keterlibatan dalam simulasi penanggulangan bencana dan keamanan lingkungan. Dalam banyak kasus, kehadiran Satlinmas di tengah masyarakat dapat menjadi bentuk kehadiran negara dalam menjaga keamanan berbasis komunitas. Jika potensi praktik langsung ini dimaksimalkan, maka anggota Satlinmas tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas dan keberadaan mereka.

c. Kondisi Kerja

Kondisi kerja merupakan indikator penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kondisi kerja yang dimaksud mencakup aspek fisik dan non-fisik, seperti sarana dan prasarana kerja, sistem penghargaan (insentif), dukungan moral, serta kenyamanan dalam bekerja. Saat ini, masih terdapat banyak keterbatasan dalam hal penyediaan fasilitas kerja bagi anggota Satlinmas di Kecamatan Bolangitang Timur. Banyak desa belum memiliki perlengkapan standar seperti seragam lengkap, identitas resmi, alat komunikasi, dan perlengkapan pengamanan ringan. Lingkungan kerja yang minim fasilitas dapat menurunkan motivasi anggota, memengaruhi semangat kerja, dan memperburuk citra institusi di mata masyarakat. Selain itu, tidak adanya insentif tetap atau keterlambatan dalam pemberian honorarium juga menjadi keluhan yang sering muncul. Tanpa dukungan kondisi kerja yang baik, sulit diharapkan Satlinmas dapat bekerja dengan optimal dan profesional. Budaya kerja yang sehat dan disiplin juga belum sepenuhnya terbentuk. Hal ini disebabkan tidak adanya sistem penilaian kinerja yang jelas dan kurangnya pembinaan berjenjang dari atasan langsung. Di sisi lain, keterlibatan pimpinan desa dalam mendukung kerja-kerja Satlinmas sangat bervariasi antar wilayah, tergantung pada kebijakan dan komitmen kepala desa masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang mengatur standar minimal kondisi kerja Satlinmas secara seragam dan mengikat di seluruh wilayah kecamatan.

d. Rekrutmen

Rekrutmen anggota Satlinmas merupakan proses awal dalam membangun kekuatan organisasi. Idealnya, proses ini dilakukan secara terbuka, objektif, dan mempertimbangkan kebutuhan wilayah serta potensi lokal yang ada. Namun, di Kecamatan Bolangitang Timur, proses perekrutan masih bersifat pasif dan cenderung hanya dilakukan saat ada anggota yang tidak aktif lagi. Tidak adanya rekrutmen berkala menyebabkan kesenjangan antara jumlah personel dengan kebutuhan nyata di lapangan. Sistem rekrutmen yang stagnan menghambat regenerasi dan mengurangi semangat kaderisasi. Selain itu, ketiadaan proses seleksi yang berbasis kompetensi membuat rekrutmen lebih banyak didasarkan pada kedekatan sosial daripada meritokrasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini

berisiko menurunkan kualitas anggota Satlinmas dan melemahkan daya saing kelembagaan di tengah meningkatnya kompleksitas permasalahan ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara itu, potensi pemuda desa sebenarnya cukup besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari Satlinmas. Dengan pendekatan yang tepat, generasi muda dapat dilibatkan sebagai mitra keamanan komunitas yang aktif, produktif, dan berintegritas. Hal ini membutuhkan strategi rekrutmen yang adaptif, inovatif, dan inklusif, serta didukung dengan pembinaan dan pelatihan yang konsisten.

2. Penguatan Organisasi

Dimensi penguatan organisasi dalam konteks Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan bagian penting dari strategi peningkatan kapasitas kelembagaan. Penguatan ini bertujuan untuk memperkuat struktur internal, sistem kerja, serta budaya organisasi agar Satlinmas dapat beroperasi secara lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Dalam perspektif *capacity building*, organisasi yang kuat tidak hanya ditandai oleh struktur formal dan hierarkis, melainkan juga oleh sistem yang mendukung kelangsungan tugas dan fungsi organisasi secara berkelanjutan. Lima indikator utama yang menjadi penopang dalam penguatan organisasi Satlinmas adalah sistem insentif, kelengkapan personel, kepemimpinan, budaya organisasi, dan komunikasi. Kelima aspek ini saling terkait satu sama lain dan berfungsi sebagai kerangka kerja yang mendukung pencapaian tujuan kelembagaan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

a. Sistem Insentif

Sistem insentif merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap kinerja dan loyalitas anggota. Dalam organisasi seperti Satlinmas, yang sebagian besar anggotanya merupakan relawan atau warga sipil yang ditugaskan oleh desa, keberadaan insentif yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga semangat dan motivasi kerja. Sayangnya, di banyak desa, termasuk di Kecamatan Bolangitang Timur, sistem insentif masih bersifat minimal dan tidak terintegrasi dalam sistem anggaran rutin. Honorarium yang diberikan kepada anggota Satlinmas umumnya bersumber dari dana desa dan hanya diberikan saat mereka terlibat dalam kegiatan tertentu. Hal ini membuat semangat kerja cenderung fluktuatif, tergantung pada aktivitas yang sedang berlangsung. Tidak adanya sistem insentif berbasis kinerja juga membuat evaluasi kerja tidak dapat dilakukan secara objektif. Akibatnya, dedikasi anggota tidak berkembang secara optimal. Diperlukan sebuah sistem insentif yang lebih komprehensif, tidak hanya berupa uang saku atau honor, tetapi juga dalam bentuk penghargaan non-material seperti sertifikat, pelatihan berjenjang, atau prioritas dalam program-program kesejahteraan desa. Sistem ini akan mendorong anggota Satlinmas untuk bekerja lebih profesional, disiplin, dan berkomitmen terhadap tugas-tugas perlindungan masyarakat.

b. Kelengkapan Personel

Kelengkapan personel merupakan indikator konkret dari kesiapan organisasi dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, perlengkapan yang dimaksud meliputi seragam resmi, tanda pengenal, kartu anggota (KTA), serta perlengkapan penunjang seperti ikat pinggang, topi, kopel, ban lengan, dan lainnya. Keberadaan perlengkapan ini bukan hanya sebagai identitas visual, melainkan juga mencerminkan

profesionalisme dan kesiapan anggota dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak anggota Satlinmas yang belum memiliki perlengkapan standar. Pengadaan perlengkapan ini tidak dilakukan secara rutin oleh pemerintah desa maupun oleh Satpol PP kabupaten. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan antara desa yang memiliki anggaran cukup dengan desa-desa yang terbatas secara fiskal. Ketidakmerataan ini pada akhirnya berdampak pada performa dan citra Satlinmas di mata masyarakat. Padahal, sesuai Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Satlinmas, setiap anggota berhak mendapatkan kelengkapan standar sesuai tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penguatan organisasi harus dimulai dari komitmen penyediaan perlengkapan yang memadai, baik melalui APBDes, bantuan kabupaten, maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Tanpa perlengkapan yang layak, pelaksanaan tugas Satlinmas akan kurang efektif dan tidak menunjukkan kesiapan institusional secara menyeluruh.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan menjadi tulang punggung dalam setiap organisasi, termasuk dalam Satlinmas. Seorang Kepala Satlinmas di tingkat desa tidak hanya dituntut untuk menjadi administrator yang mengelola personel dan logistik, tetapi juga harus mampu memimpin dengan keteladanan, menginspirasi anggotanya, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa dan masyarakat. Kepemimpinan yang kuat akan memudahkan koordinasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas perlindungan masyarakat. Dalam konteks Kecamatan Bolangitang Timur, peran Kepala Satlinmas sangat penting dalam menciptakan sistem kerja yang terarah dan adaptif. Mereka harus mampu mengidentifikasi potensi konflik di masyarakat, menyusun rencana keamanan bersama aparat lain, serta memotivasi anggotanya untuk tetap aktif meskipun dengan keterbatasan yang ada. Sayangnya, masih banyak kepala Satlinmas yang belum mendapatkan pelatihan kepemimpinan atau manajemen organisasi secara formal. Idealnya, penguatan kapasitas pemimpin Satlinmas dilakukan secara sistematis melalui pelatihan manajemen, peningkatan keterampilan komunikasi, dan forum berbagi pengalaman antar desa. Dengan begitu, kepemimpinan di dalam tubuh Satlinmas akan lebih kokoh dan mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks.

d. Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, norma, dan kebiasaan kerja yang menjadi identitas internal dari suatu organisasi. Dalam Satlinmas, budaya organisasi memainkan peran penting dalam membentuk etos kerja dan solidaritas antar anggota. Budaya gotong royong, kedisiplinan, kepedulian terhadap lingkungan, dan tanggung jawab sosial adalah nilai-nilai yang sangat relevan dan sudah mengakar di masyarakat desa. Di banyak desa di Bolangitang Timur, Satlinmas tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kerja bakti, pengamanan kegiatan adat, hingga bantuan dalam bencana alam. Partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa budaya organisasi Satlinmas tidak terbatas pada fungsi formal, melainkan juga terintegrasi dengan budaya lokal dan kearifan masyarakat setempat. Penguatan budaya organisasi dapat dilakukan melalui pembinaan berkala, penciptaan slogan atau moto bersama, serta penguatan identitas

kelembagaan melalui simbol, atribut, dan kegiatan rutin. Budaya kerja yang baik akan menjadi pondasi non-formal yang mendorong loyalitas dan rasa memiliki yang tinggi terhadap organisasi.

e. Komunikasi

Komunikasi adalah prasyarat utama dalam pengelolaan organisasi yang efektif. Dalam konteks Satlinmas, komunikasi berperan dalam menyampaikan instruksi, membangun koordinasi, serta menjembatani hubungan antara anggota dengan pimpinan, maupun dengan masyarakat dan instansi lain. Keterbukaan dalam komunikasi juga penting untuk menciptakan rasa saling percaya dan kolaborasi yang solid. Di tingkat desa, komunikasi dalam tubuh Satlinmas sering dilakukan secara informal melalui pertemuan rutin, arahan langsung dari kepala desa, atau komunikasi lisan sebelum kegiatan dimulai. Namun, komunikasi yang bersifat sistematis dan terdokumentasi masih minim. Selain itu, kurangnya pemanfaatan media informasi seperti grup WhatsApp atau aplikasi lainnya menyebabkan keterlambatan informasi dan koordinasi antaranggota. Penguatan sistem komunikasi harus menjadi bagian dari reformasi internal organisasi. Penggunaan alat komunikasi sederhana yang terintegrasi dengan sistem desa, penyusunan buku saku prosedur, serta pelatihan komunikasi efektif dapat meningkatkan kualitas hubungan kerja di dalam Satlinmas. Komunikasi yang baik tidak hanya akan memperlancar pelaksanaan tugas, tetapi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya Satlinmas menjaga ketertiban lingkungan.

3. Reformasi Kelembagaan

Dimensi reformasi kelembagaan merupakan aspek penting dalam penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), yang bertujuan untuk memperbaiki struktur hukum dan birokrasi guna menciptakan sistem kerja yang lebih efisien, responsif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, reformasi kelembagaan dilakukan melalui perubahan atau pembaruan kebijakan yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat, jelas, dan terperinci terhadap keberadaan, peran, serta fungsi Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman umum.

Namun, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, implementasi dimensi reformasi kelembagaan masih tergolong minim. Hal ini tercermin dari belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur secara rinci tentang Satlinmas. Regulasi yang berlaku masih terbatas pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang tidak secara eksplisit mengatur mekanisme kerja maupun penguatan kelembagaan Satlinmas. Akibatnya, pelaksanaan fungsi-fungsi Satlinmas di lapangan lebih banyak mengandalkan pedoman dari tingkat nasional seperti Permendagri, serta inisiatif koordinatif di tingkat lokal.

Ketiadaan regulasi yang spesifik menyebabkan berbagai tantangan kelembagaan, seperti tidak adanya kejelasan tentang alokasi anggaran khusus, struktur komando, mekanisme pelaporan, hingga peran Satlinmas dalam konteks sinergi lintas sektor. Reformasi kelembagaan diperlukan agar Satlinmas dapat memiliki dasar hukum operasional yang lebih kuat, sehingga fungsi perlindungan masyarakat dapat berjalan secara optimal, terarah, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan regulasi baru atau memperbarui regulasi yang ada, dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan keamanan masyarakat berbasis lokal. Pembaruan kebijakan ini akan mendorong

penguatan kelembagaan, meningkatkan legitimasi peran Satlinmas, serta menciptakan struktur birokrasi yang lebih adaptif dan mampu menjawab tantangan keamanan dan ketertiban yang semakin kompleks di tingkat desa maupun kabupaten.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kecamatan Bolangitang Timur masih menghadapi tantangan serius dalam tiga dimensi utama: pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Temuan ini selaras dan diperkuat oleh berbagai studi terdahulu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menyoroti peran penting pendekatan *community policing*, tata kelola keamanan lokal, dan pemberdayaan komunitas dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat (Indarti, 2019; Muladi & Suparno, 2021; Winarko & Mursyidah, 2024).

Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, lemahnya kapasitas teknis dan non-teknis anggota Satlinmas di Bolangitang Timur sejalan dengan temuan bahwa keberhasilan Satlinmas sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Pelatihan berkelanjutan serta penguatan *soft skills* menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran Satlinmas (Winarko & Mursyidah, 2024). Hal ini juga didukung oleh pernyataan bahwa pelatihan serta pembagian peran yang jelas merupakan faktor penting dalam membangun sistem keamanan berbasis masyarakat yang tangguh (Muladi & Suparno, 2021). Namun, di lapangan, pelatihan bagi anggota Satlinmas masih minim dan bersifat insidental, tidak terintegrasi dalam sistem pembinaan yang berkelanjutan. Kondisi ini semakin diperparah dengan keterbatasan jumlah personel dan ketidakteraturan dalam pemberian insentif, sebagaimana juga diungkap bahwa kekurangan personel, kapasitas kelembagaan yang rendah, serta dukungan anggaran yang minim merupakan hambatan umum dalam efektivitas penegakan hukum dan ketertiban di negara-negara berkembang (Fakunle et al., 2020). Dalam konteks lokal, hal ini sangat nyata terlihat dari kondisi Satlinmas di Kecamatan Bolangitang Timur yang belum memiliki sistem insentif berkelanjutan dan masih mengandalkan anggaran kegiatan secara ad hoc.

Dari perspektif penguatan organisasi, ketiadaan perlengkapan standar dan lemahnya dukungan struktural menunjukkan bahwa aspek profesionalisme belum sepenuhnya dibangun dalam tubuh Satlinmas. Penelitian sebelumnya menekankan pentingnya prinsip-prinsip *democratic policing* dalam pendekatan *community policing* (Polmas), yang menuntut akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi aktif masyarakat (Indarti, 2019). Dalam hal ini, peran Satlinmas sebagai representasi masyarakat dalam sistem keamanan lokal perlu diperkuat secara kelembagaan agar mampu menjalin kesmitraan yang sinergis dengan aparat lain dan masyarakat. Hal ini selaras dengan temuan yang menegaskan bahwa kedekatan emosional dan komunikasi antara aparat dan warga menjadi fondasi dalam menciptakan ketertiban (Aditama et al., 2023; Margaret & Irfi, 2024). Di Bolangitang Timur, anggota Satlinmas yang berasal dari masyarakat setempat sebenarnya memiliki potensi membangun hubungan emosional yang kuat, namun belum didukung oleh pelatihan komunikasi dan sistem koordinasi yang baik.

Adapun dari sisi reformasi kelembagaan, belum adanya regulasi daerah yang spesifik mengatur tentang Satlinmas di Bolaang Mongondow Utara menjadi hambatan utama dalam penguatan kapasitas kelembagaan. Hal ini memperlemah struktur komando, tidak ada kejelasan dalam mekanisme pelaporan, serta menyebabkan alokasi anggaran dan perencanaan kerja menjadi tidak pasti. Temuan ini menguatkan hasil studi yang menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dan regulasi yang kuat dalam menciptakan tata kelola keamanan yang efektif dan akuntabel (Boamah et al., 2012). Lebih jauh, pendekatan *community policing* yang dikembangkan secara internasional juga menawarkan peluang transformasi kelembagaan Satlinmas. Studi-studi terdahulu menyoroti peran teknologi dalam menciptakan sistem keamanan publik yang responsif melalui penggunaan aplikasi digital dan pemanfaatan sistem

informasi berbasis komunitas (Elphick et al., 2021; Xu et al., 2019). Inovasi semacam ini relevan untuk diterapkan dalam reformasi Satlinmas, terutama dalam pelaporan kejadian secara *real-time*, pemetaan kerawanan, serta peningkatan efisiensi koordinasi antarpemangku kepentingan.

Dalam konteks sosial, ditunjukkan bahwa Satlinmas memiliki potensi menjadi aktor sosial yang berperan dalam mediasi konflik horizontal di masyarakat (Hariyanto & Suseno, 2025). Posisi Satlinmas yang dekat secara sosiokultural dengan warga memungkinkan mereka berfungsi sebagai pen jembatan dalam dinamika konflik lokal. Namun, peran ini belum dimaksimalkan karena keterbatasan pelatihan dan absennya kerangka kerja yang mendukung fungsi tersebut. Studi lain dalam konteks pemberdayaan komunitas dalam penanggulangan narkoba juga relevan, karena menekankan bahwa partisipasi masyarakat dapat memperkuat ketahanan sosial terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan (Pasaribu, 2018; Nur & Margaret, 2024). Dalam hal ini, Satlinmas sebagai bagian dari masyarakat dapat memainkan peran vital dalam mendorong kesadaran kolektif melalui pendekatan Polmas.

Tantangan persepsi masyarakat terhadap aparat penegak ketertiban juga menjadi sorotan dalam studi yang menyoro ti citra negatif Satpol PP sebagai salah satu hambatan dalam menciptakan hubungan yang humanis antara aparat dan warga (Suhendi, 2021). Satlinmas sebagai unsur sipil yang melekat di desa memiliki peluang untuk tampil lebih humanis dan komunikatif, namun untuk itu dibutuhkan pelatihan dan pendekatan kultural yang tepat agar dapat membangun kepercayaan masyarakat.

3.3 Diskusi Topik Menarik Lainnya

Topik yang menarik dari hasil penelitian ini adalah peran budaya lokal dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat efektivitas Satlinmas di tengah berbagai keterbatasan struktural. Di banyak desa, nilai-nilai seperti kepedulian sosial, kedisiplinan, dan gotong royong telah menjadi bagian dari budaya organisasi Satlinmas, yang berkontribusi besar dalam menjaga ketertiban meskipun tanpa dukungan anggaran besar. Hal menarik lainnya adalah fleksibilitas peran Satlinmas dalam perayaan adat dan keagamaan, yang menunjukkan bahwa meskipun keberadaan Satlinmas tidak selalu aktif secara formal, namun dalam momen-momen krusial mereka tetap menjadi aktor kunci pengamanan. Ini memperlihatkan adanya *embedded function* Satlinmas yang menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat, sehingga keberadaannya tetap relevan. Selain itu, penguatan kapasitas tidak hanya terjadi dari atas ke bawah (top-down), tetapi justru banyak didorong dari bawah ke atas (bottom-up), melalui dorongan dan kesadaran kolektif masyarakat lokal. Ini mengindikasikan bahwa strategi pemberdayaan yang menitikberatkan pada penguatan sosial dan relasi lokal bisa lebih efektif dibanding hanya melalui kebijakan administratif semata.

IV KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kecamatan Bolangitang Timur belum berjalan secara optimal dan masih dihadapkan pada tantangan struktural dan operasional yang kompleks. Pada aspek pengembangan sumber daya manusia, keterbatasan pelatihan, rekrutmen yang tidak terstandarisasi, serta kondisi kerja yang minim dukungan telah menyebabkan rendahnya profesionalitas dan kesiapan personel dalam menjalankan fungsi-fungsi keamanan dan ketertiban umum. Padahal, dalam konteks keamanan komunitas, kualitas dan motivasi personel merupakan syarat utama efektivitas Satlinmas. Dari sisi organisasi, belum adanya sistem insentif yang berkelanjutan, keterbatasan perlengkapan tugas, serta lemahnya pola komunikasi dan kepemimpinan internal turut memperlemah kinerja kelembagaan. Selain itu, sistem penilaian kinerja dan pembinaan belum terbangun secara konsisten, yang berdampak pada

rendahnya produktivitas dan akuntabilitas anggota. Di sisi lain, aspek reformasi kelembagaan belum menunjukkan kemajuan berarti akibat ketiadaan regulasi daerah yang secara khusus mengatur tentang struktur, fungsi, mekanisme kerja, serta dukungan anggaran untuk Satlinmas. Ketergantungan pada regulasi nasional tanpa dukungan kebijakan lokal menjadikan posisi Satlinmas rentan secara administratif dan tidak memiliki legitimasi yang kuat di tingkat desa. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan kekuatan sosial yang signifikan berupa tingginya partisipasi masyarakat, budaya gotong royong yang masih kuat, serta sinergi awal yang mulai terbentuk antara Satpol PP, TNI/Polri, dan pemerintah desa. Modal sosial ini dapat menjadi fondasi penting dalam mendorong penguatan Satlinmas apabila dikelola melalui pendekatan yang terstruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pembaruan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan regulasi daerah yang spesifik, penyediaan pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem insentif, hingga inovasi berbasis teknologi digital guna mewujudkan Satlinmas yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap tantangan keamanan lokal berbasis komunitas.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu disadari. Pertama, data yang diperoleh masih terbatas pada wilayah Kecamatan Bolangitang Timur, sehingga belum mewakili secara keseluruhan kondisi Satlinmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kedua, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara luas, tetapi lebih bersifat kontekstual dan mendalam. Ketiga, sebagian besar informasi diperoleh dari informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung, namun belum disertai data kuantitatif mengenai efektivitas tugas Satlinmas secara aktual di lapangan. Selain itu, beberapa aspek penting seperti evaluasi langsung terhadap hasil kerja Satlinmas, jumlah gangguan ketertiban yang berhasil diatasi, atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap kehadiran Satlinmas belum dikaji secara sistematis karena keterbatasan waktu dan akses lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian ke depan dapat diarahkan pada beberapa fokus utama. Pertama, perlu dilakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur sejauh mana efektivitas kinerja Satlinmas dalam menurunkan tingkat gangguan ketertiban umum di masyarakat. Kedua, penelitian komparatif lintas kecamatan juga penting untuk melihat variasi model penguatan Satlinmas antara satu wilayah dengan wilayah lain, sehingga dapat dirumuskan model terbaik yang sesuai dengan kondisi sosial dan geografis masing-masing. Ketiga, diperlukan kajian lebih dalam tentang model pelatihan berkelanjutan, terutama berbasis teknologi informasi, yang bisa menjawab keterbatasan anggaran dengan metode pelatihan daring atau berbasis komunitas. Keempat, arah penelitian masa depan juga perlu mengeksplorasi peran perempuan dan generasi muda dalam tubuh Satlinmas, yang selama ini kurang terlihat namun potensial sebagai agen keamanan berbasis komunitas. Dengan arah pengembangan ini, penguatan Satlinmas di masa depan tidak hanya menjawab kebutuhan administratif, tetapi juga mampu menjawab tantangan keamanan berbasis partisipasi dan budaya lokal yang dinamis.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Polisi Resor Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah memberikan kesempatan

penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, M., Laksana, C. D., & Aminoto, M. E. (2023). Implementation of community policing in actualizing precise police force in Mamuju City Police Station. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(5), 505–515. <https://ijssrr.com/journal/article/view/1328>
- Boamah, N. A., Gyimah, C., & Bediako Nelson, J. K. (2012). Challenges to the enforcement of development controls in the Wa municipality. *Habitat International*, 36(1), 136–142. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.06.010>
- Elphick, C., Philpot, R., Zhang, M., Stuart, A., Walkington, Z., Frumkin, L. A., Pike, G., Gardner, K., Lacey, M., Levine, M., Price, B., Bandara, A., & Nuseibeh, B. (2021). Building trust in digital policing: A scoping review of community policing apps. *Police Practice and Research*, 22(5), 1469–1491. <https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1861449>
- Fakunle, F., Opiti, C., Sheikh, A., & Fashina, A. (2020). Major barriers to the enforcement and violation of building codes and regulations: A global perspective. *SPC Journal of Environmental Sciences*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.14419/jes.v2i1.30371>
- Grindle, M. S. (1997). Divergent cultures? When public organizations perform well in developing countries. *World Development*, 25(4), 481–495.
- Hariyanto, R., & Suseno, B. (2025). The role of the police in handling conflicts between residents in Jakarta: The perspective of community policing theory and Semelser's theory. *Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science*, 2(1), 216–226. <https://doi.org/10.59631/multidiscience.v2i1.326>
- Indarti, E. (2019). Community policing sebagai democratic policing: Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 11–20. <https://doi.org/10.35879/jik.v13i2.164>
- Margaret, M., & Saputra, I. (2024). Implementasi community policing dalam pencegahan tawuran warga di wilayah hukum Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat. *iKRAITH HUMANIORA*, 8(2). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3099>
- Muladi, M., & Suparno, S. (2021). Policy implementation of community policing in the handling of crime in community. In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2021)*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306853>
- Nur, H. A., & Margaret, M. (2024). Implementation of community policing by the Narcotics Investigation Unit of Polresta Bogor Kota in drug abuse prevention. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(4), 635–648. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.423>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Pasaribu, R. (2018). Fight narcotics with community strengthening: Crime control management by community policing. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 237–252. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27533>
- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (2024). *Laporan kinerja ketertiban dan keamanan Kecamatan Bolangitang Timur tahun 2022–2024*. Bagian Pemerintahan dan Ketertiban Umum.
- Polres Bolaang Mongondow Utara. (2023). *Laporan tahunan gangguan keamanan wilayah hukum Polres Bolaang Mongondow Utara tahun 2023*. Kepolisian Resor Bolmut.

- Rasyid, M. R. (2007). *Makna pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik – legalistik – empirik – inovatif* (2nd ed.). ALFABETA.
- Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakkan peraturan daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(2), 157–175.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/download/1588/1014/>
- Winarko, A. D., & Mursyidah, L. (2024). Empowerment of Satlinmas in improving public order and security. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3).
<https://doi.org/10.21070/ijccd.v16i1.1137>
- Wolff, E., French, M., Ilhamsyah, N., Sawailau, M. J., & Ramírez-Lovering, D. (2021). Collaborating with communities: Citizen science flood monitoring in urban informal settlements. *Urban Planning*, 6(4), 351–364. <https://doi.org/10.17645/up.v6i4.4648>
- Xu, R., Nikouei, S. Y., Chen, Y., Blasch, E., & Aved, A. (2019). BlendMAS: A blockchain-enabled decentralized microservices architecture for smart public safety. In *2019 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain)* (pp. 564–571). IEEE.
<https://doi.org/10.1109/Blockchain.2019.00082>
- Yoon, D.-R., & Kim, J.-H. (2018). Decentralization, government capacity, and environmental policy performance: A cross-national analysis. *International Journal of Public Administration*, 41(13), 1082–1092.
https://www.researchgate.net/publication/316803799_Decentralization_Government_Capacity_and_Environmental_Policy_Performance_A_Cross-National_Analysis

